

LEGAL PROTECTION OF CREW MEMBERS' RIGHTS UNDER EXPIRED SEAFARER'S EMPLOYMENT AGREEMENT AT PT XYZ

By:

Ditha Nurlaila Azhomah¹, Murti Pramuwardhani Dewi²

ABSTRACT

This research aims to identify and analyze the legal protection of the rights of crew members whose employment contracts have expired at PT XYZ and it also aims to identify and analyze the role of the Banten Harbor Master in handling crew members who continue to work without contract renewal.

This research method uses a normative-empirical legal research method with a descriptive nature. The data used in this research include primary data obtained from field research using purposive sampling and direct interviews with respondents and informants using interview guidelines as data collection tools. Secondary data were obtained through primary, secondary, and tertiary legal materials. Furthermore, the data collected from both field research and literature were analyzed qualitatively and deductively.

The results of this research indicate a discrepancy between the applicable regulations and the facts on the ground at PT XYZ. First, legal protection for the rights of crew members has not been optimally fulfilled, because PT XYZ does not renew the seafarer's employment agreement of crew members whose contracts have expired but are still employed, and the rights granted by PT XYZ do not comply with legal provisions and regulations. This creates legal uncertainty regarding the status of the work relationship of crew members and creates legal injustice towards the rights of crew members. Second, the role of the Banten Harbor Master as the authorized agency is not yet optimal and is not proactive in conducting direct routine supervision of seafarer's employment agreement.

Keywords: Legal Protection, Crew Members, Seafarer's Employment Agreement, The Banten Harbor Master

¹ Master of Laws Student (Jakarta Campus), Faculty of Law, Gadjah Mada University, Yogyakarta.
Email: dithanurlailaazhomah@mail.ugm.ac.id.

² Lecturer in the Master of Law Program, Gadjah Mada University, Yogyakarta.
Email: murti.pramuwardani@mail.ugm.ac.id.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK AWAK BUAH KAPAL ATAS PERJANJIAN KERJA LAUT YANG TELAH HABIS JANGKA WAKTU DI PT XYZ

Oleh:

Ditha Nurlaila Azhomah¹, Murti Pramuwardhani Dewi²

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap hak-hak awak buah kapal atas Perjanjian Kerja Laut yang telah habis jangka waktu di PT XYZ dan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana peran Syahbandar Banten dalam menghadapi kondisi awak buah kapal yang tetap bekerja tanpa adanya pembaruan perjanjian kerja laut.

Metode Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif-empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer yang didapatkan dari penelitian lapangan dengan melakukan penentuan sampel secara purposive sampling dan wawancara langsung kepada responden dan narasumber dengan alat pengumpulan data berupa pedoman wawancara. Data sekunder didapatkan melalui bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Selanjutnya data yang terkumpul baik dalam penelitian lapangan dan kepustakaan dilakukan analisis secara kualitatif dengan penarikan kesimpulan secara deduktif.

Hasil penelitian ini terdapat ketidaksesuaian antara regulasi yang berlaku dengan fakta di lapangan di PT XYZ. Pertama, perlindungan hukum terhadap hak-hak awak buah kapal belum terpenuhi secara optimal, karena PT XYZ tidak melakukan pembaruan perjanjian kerja laut awak buah kapal yang masa kontraknya telah berakhir namun masih dipekerjakan serta hak-hak yang diberikan PT XYZ tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai status hubungan kerja awak buah kapal dan menimbulkan ketidakadilan hukum terhadap hak-hak awak buah kapal. Kedua, peran Syahbandar Banten sebagai instansi yang berwenang belum maksimal dan tidak proaktif dalam melakukan pengawasan rutin secara langsung terhadap perjanjian kerja laut.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Awak Buah Kapal, Perjanjian Kerja Laut, Syahbandar Banten

¹ Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum (Kampus Jakarta), Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Email: dithanurlailaazhomah@mail.ugm.ac.id.

² Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Email: murti.pramuwardani@mail.ugm.ac.id.